



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Juli 2026

Nomor : S/800.2/893/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Edaran Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penyusunan Produk
Hukum Pola BIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Yth. Terlampir
c.q. Kepala BKD / BKPPD / BKPSDM
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan, bahwa pada tahun 2026 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan **Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026** yang terjadwal pada tanggal **10 – 20 Agustus 2026** menggunakan metode *blended learning*, dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan dimaksud, mengharap kesediaannya untuk menginformasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkup Perangkat Daerah masing-masing Pemda, serta menugaskan dan mengirimkan peserta sesuai dengan persyaratan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Lilik Budi Irwanto (WA. 085-713-777-327) atau Sdr. Prima Mahardika Putra (WA. 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n.Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 197607302001122003

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Surat Gubernur Jawa Tengah

Tanggal : 17 Juli 2026

Nomor : S/800.2/893/2026

KEPADA YTH.

1. BUPATI BANJARNEGARA
2. BUPATI BANYUMAS
3. BUPATI BATANG
4. BUPATI BLORA
5. BUPATI BOYOLALI
6. BUPATI BREBES
7. BUPATI CILACAP
8. BUPATI DEMAK
9. BUPATI GROBOGAN
10. BUPATI JEPARA
11. BUPATI KARANGANYAR
12. BUPATI KEBUMEN
13. BUPATI KENDAL
14. BUPATI KLATEN
15. BUPATI KUDUS
16. BUPATI MAGELANG
17. BUPATI PATI
18. BUPATI PEKALONGAN
19. BUPATI PEMALANG
20. BUPATI PURBALINGGA
21. BUPATI PURWOREJO
22. BUPATI REMBANG
23. BUPATI SEMARANG
24. BUPATI SRAGEN
25. BUPATI SUKOHARJO
26. BUPATI TEGAL
27. BUPATI TEMANGGUNG
28. BUPATI WONOGIRI
29. BUPATI WONOSOBO
30. WALIKOTA MAGELANG
31. WALIKOTA PEKALONGAN
32. WALIKOTA SALATIGA
33. WALIKOTA SEMARANG
34. WALIKOTA SURAKARTA
35. WALIKOTA TEGAL
36. PIMPINAN PEMDA / INSTANSI LAINNYA

Lampiran II

Surat Gubernur Jawa Tengah

Tanggal : 17 Juli 2026

Nomor : S/800.2/893/2026

KETENTUAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM (POLA BIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai produk hukum daerah yang memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek materi muatan, teknik penyusunan, maupun harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan dinamika regulasi nasional dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, Aparatur Sipil Negara yang menangani penyusunan produk hukum daerah perlu memiliki kompetensi yang memadai di bidang legal drafting

Oleh karena itu, Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis peserta dalam menyusun produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, implementatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

2. Maksud dan Tujuan

Pelatihan dimaksudkan untuk membekali ASN Pemerintah Daerah yang menangani produk hukum dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan taat asas, harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah masing-masing.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dilaksanakan secara *blended-learning* selama 8 (delapan) hari kerja, pada tanggal **10 – 20 Agustus 2026**. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan perangkat pembelajaran aplikasi Zoom Meetings serta LMS Siptenan untuk sesi online/ daring serta pembelajaran tatap muka bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk sesi offline/ luring atau klasikal.

4. Kurikulum Pelatihan

Jumlah kurikulum **Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026** yaitu **48 JP** dengan rincian sebagai berikut :

NO	MATERI	JP	PENGAMPU
	MATERI UMUM	4	
1	Kebijakan Nasional dalam rangka penyusunan Produk Hukum di Daerah	2	Ditjen Otonomi Daerah (Direktorat Produk Hukum Daerah) Kemendagri
2	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah	2	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
	MATERI POKOK	31	
1	Ilmu Hukum Dasar dan Teori Pembentukan Produk hukum	3	Akademisi (FH Undip)
2	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah (Perda dan Perkada)	2	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
3	Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah	3	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
4	Proses dan Tahapan Penyusunan Produk Hukum Daerah	3	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
5	Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah	6	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
6	Bahasa Peraturan Perundang-undangan	3	Akademisi (FH Undip)
7	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	3	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
8	Penanganan Sengketa Dampak Penetapan Produk Hukum Daerah	2	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
9	Praktik Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	6	Biro Hukum Setda Prov. Jateng
	MATERI PENUNJANG	13	
1	Pengarahan Program	1	BPSDMD Prov. Jateng
2	Pendidikan Anti Korupsi	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
3	ASN BerAkhlak	2	WI BPSDMD Prov. Jateng
4	Pre Test & Post Test	2	Penyelenggara
5	Seminar Paparan Tugas Akhir	5	Tim Penguji
6	Evaluasi Penyelenggaraan & Tenaga Pengajar	1	BPSDMD Prov. Jateng
	JUMLAH	48	

5. Jadwal Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (Pola BIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menggunakan metode *blended-learning* selama 8 (delapan) hari kerja, yang terdiri dari 5 (lima) hari pembelajaran secara daring / *online*, 3 (tiga) hari secara luring / klasikal. Pembelajaran secara daring / *online* di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer / laptop atau gawai / *smartphone*, sedangkan pembelajaran klasikal bertempat di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Adapun alokasi waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :

No	Hari ke	Pukul	Materi	Keterangan
1	1	08.00 - 14.00	• Upacara Pembukaan • Penyampaian Materi Umum • Panduan Penyusunan TA	Pembelajaran Daring via ZOOM
2	2 – 5	08.00 - 14.00	• Penyampaian Materi Pokok 1- 8 dan Materi Penunjang 2- 3	
3	6 – 7	08.00 - 16.00	• Penyampaian Materi Pokok 5 dan 9 • Penyusunan TA	Pembelajaran Klasikal di BPSDMD Prov. Jateng
4	8	08.00 - selesai	• Seminar • Evaluasi • Upacara Penutupan	

6. Peserta

- Target jumlah peserta yaitu 40 (empat puluh) orang.
- Sasaran peserta pelatihan adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah maupun Instansi Lainnya, utamanya ASN yang mengampu tugas / diproyeksikan sebagai pengolah atau penyusun produk hukum pada instansinya.

7. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP). Adapun biaya kontribusi mengikuti pelatihan ditetapkan sebesar **Rp 2.500.000,- per peserta** (di luar biaya perjalanan dinas peserta).

8. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Online peserta maksimal tanggal **7 Agustus 2026** dengan mengisi biodata peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :

- Surat Perintah Tugas
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai pernyataan Komitmen Pimpinan (format dapat diunduh pada tautan https://s.id/PKS_BIP)*
 - Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi kupu untuk perempuan, mengenakan papan nama)
- ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di <https://s.id/daftarProKum2026>.

** Catatan :*

- 1) Dokumen PKS dipersyaratkan sebagai wujud pernyataan kesepakatan dan komitmen pimpinan OPD/Instansi dalam pengiriman peserta pelatihan;*
- 2) Apabila instansi mengirim lebih dari 1 orang peserta, maka cukup membuat 1 (satu) dokumen PKS untuk semua peserta;*
- 3) Dokumen PKS dicetak 2 kali. 1 Dokumen ditandatangani dengan dibubuhkan bermaterai Rp 10.000 oleh pimpinan OPD/instansi pengirim.*
- 4) Dokumen PKS mohon dikirimkan secara fisik kepada panitia dengan alamat:
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi 201A, Srandol, Banyumanik, Semarang - 50263*